

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem otonomi daerah, terdapat 3 (tiga) prinsip yang dijelaskan UU No.23 Tahun 2014 yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari kinerja daerah dalam mengelola keuangannya. Suatu daerah mampu berotonomi dilihat dari kemampuan keuangan daerah. Artinya, harus mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Kemandirian suatu daerah sangat diperlukan karena suatu daerah yang mandiri berarti tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat sangat rendah, bahkan tidak tergantung sama sekali.

Ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus seminimal mungkin sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam

sistem pemerintahan negara. PAD juga merupakan salah satu tolok ukur dari keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah yang besar juga menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat dalam menanggung biaya pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah yang besar dapat memberikan kebebasan besar bagi Pemerintah Daerah untuk membuat inisiatif dan rencana yang dibutuhkan oleh daerah. (Kuswandi, 2009).

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004, DAU adalah transfer dari pemerintah bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang di maksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).

Tabel 1.1 Dana Alokasi Umum  
Kota Padang Tahun 2011-2015

No	Tahun	DAU (Dalam Juta Rupiah)	% Peningkatan DAU
1	2011	711.730,929	-
2	2012	871.875,666	18,36%
3	2013	1.003.116,093	13,08%
4	2014	1.060.917,648	5,44%
5	2015	1.072.429,395	1,12%

Sumber : DPKA Kota Padang

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa dana transfer dari pemerintah berupa Dana Alokasi Umum 5 (lima) tahun kebelakang terus mengalami peningkatan. Yang berarti bahwa kemandirian keuangan Daerah di Kota Padang masih belum mencukupi kebutuhan fiskal daerah. Prakosa (2007) mengatakan bahwa, dengan adanya transfer dana dari Pemerintah pusat tersebut, bagi pemma merupakan sumber pendanaan dalam pelaksanaan

kewenangannya. Namun dalam kenyataannya, transfer dana tersebut merupakan sumber dana utama pemda untuk membiayai belanja daerah. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Seharusnya kekurangan dari transfer dana tersebut diharapkan dapat diambil dari sumber pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1.2 Realisasi PAD Kota Padang  
Tahun 2011-2015

No	Tahun	Realisasi PAD (Ribuan Rupiah)	% Pertumbuhan
1	2011	149.874.800	-
2	2012	189.450.840	23,07%
3	2013	238.871.890	26,07%
4	2014	315.678.800	32,15%
5	2015	370.413.732	17,33%

Sumber : DPKA Kota Padang

PAD Kota Padang 5 (lima) tahun kebelakang selalu mengalami peningkatan, terlihat dalam Tabel 1.2. namun peningkatan PAD di setiap tahun ini tidak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam upaya menuju kemandirian daerah dibuktikan dengan terus meningkatkan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat yang tercermin dari perolehan DAU yang terus meningkat di setiap tahunnya.

Di Dalam UU No. 33 Tahun 2004 telah diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal selain melalui Dana Bagi Hasil Pajak dengan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan dan PAD lain-lain yang sah. Dengan melakukan optimalisasi PAD dengan meningkatkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan dan PAD lain-lain yang sah serta mengoptimalkan Bagi Hasil Pajak diharapkan dapat meningkatkan kemandirian.

Pertumbuhan perekonomian suatu daerah dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Pada umumnya perkembangan perekonomian suatu wilayah dapat diketahui melalui perkembangan PDRB dan sumbangan setiap sektor terhadap nilai PDRB tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara/wilayah/daerah. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB.

Tabel 1.3 PDRB Kota Padang  
Tahun 2011-2015

No	Tahun	PDRB (Dalam Milyar Rupiah)	% Pertumbuhan
1	2011	27.542,86	-
2	2012	31.136,59	11,54%
3	2013	35.860,56	13,17%
4	2014	41.653,29	13,90%
5	2015	50.324,69	17,23%

Sumber : data BPS (Padang Dalam Angka)

Tabel 1.3 menunjukkan nilai PDRB riil atas dasar harga berlaku Kota Padang 5 (lima) tahun kebelakang. Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa nilai PDRB Kota Padang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2012 pertumbuhan PDRB sebesar 11,54%, kemudian meningkat pada tahun 2013 sebesar 13,17%. Tahun 2014 meningkat lagi menjadi 13,90% dan tahun 2015 sebesar 17,23%. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan produk domestik

regional bruto perkapita (PDRB perkapita) (Zaris, 1987: 82). Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian.

Pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan akan lebih sulit dilakukan pemerintah daerah apabila tanpa adanya dukungan dari pihak swasta. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung penanaman modal yang saling menguntungkan baik bagi pemerintah daerah, pihak swasta maupun terhadap masyarakat daerah. Tumbuhnya iklim investasi yang sehat dan kompetitif diharapkan akan memacu perkembangan investasi yang saling menguntungkan dalam pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari tingkat investasi suatu daerah. Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar. Secara teoritis, daerah dengan peringkat daya tarik investasi yang tinggi akan memiliki jumlah PAD yang tinggi pula, karena investasi di suatu daerah dengan sendirinya akan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah tersebut untuk kemudian meningkatkan jumlah pendapatan daerah dari pajak.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk melihat apakah daerah telah siap secara finansial untuk menyongsong otonomi daerah, antara lain adalah dengan melihat apakah sumber-sumber penerimaan APBDnya mampu menutup anggaran belanja daerah yang bersangkutan. Di samping itu anggaran belanja pembangunan yang dialokasikan pada program proyek yang langsung

menyentuh sektor ekonomi produktif masyarakat akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (Uppal,1986).

Tabel 1.4 Pengeluaran Pemerintah  
Kota Padang Tahun 2011-2015

No	Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Juta Rupiah)	% Pertumbuhan
1	2011	1.180.346	-
2	2012	1.400.212	15,70%
3	2013	1.619.577	15,64%
4	2014	1.794.324	10,79%
5	2015	1.948.367	8,59%

Sumber : data BPS ( Padang Dalam Angka 2011-2015)

Tabel 1.4 menunjukkan realisasi pengeluaran pemerintah Kota Padang 5 (lima) tahun kebelakang. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah Kota Padang mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan 2013 dan mengalami penurunan pada tahun 2014. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

Dengan berjalannya otonomi daerah, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan potensi daerahnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerahnya. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, secara otomatis pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga meningkat. Melalui otonomi daerah, Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat menggali potensi-potensi daerah yang ada. Pemerintah Kota Padang sangat berperan penting dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dalam hal menggali potensi

daerahnya. Sehingga pendapatan daerah yang meningkat dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana PDRB, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang, maka peneliti mengambil judul sebagai berikut. “ **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2001 - 2015**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti antara lain:

- a. Bagaimana pengaruh PDRB Kota Padang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, Sumatera Barat?
- b. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, Sumatera Barat?
- c. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, Sumatera Barat?
- d. Bagaimana pengaruh PDRB, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah secara bersama-sama terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, Sumatera Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB Kota Padang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, Sumatera Barat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, Sumatera Barat.

- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, Sumatera Barat
- d. Untuk mengetahui pengaruh PDRB, Investasi, dan Pengeluaran pemerintah secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, Sumatera Barat

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh :

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang.

- b. Bagi Penulis

Sebagai wujud penerapan dan pengamalan ilmu yang telah didapatkan pada masa kuliah yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada program studi Akuntansi Pemerintah di Universitas Andalas

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisannya, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II : LANDASAN TEORITIS**

Berisi teori-teori baik dari literatur maupun peraturan perundang – undangan yang terkait dan relevan dengan pokok masalah.

##### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai gambaran umum subyek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

#### BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH DAN OBYEK PENELITIAN

Bab ini berisi data umum mengenai profil pemerintah Kota Padang meliputi : kondisi geografis, pemerintahan, keuangan, struktur perekonomian dan sebagainya.

Bab ini juga membahas tinjauan keuangan daerah Kota Padang dari tahun 2001 – 2015.

#### BAB V : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi analisis data dan pembahasan hasil penelitian mengenai pengaruh PDRB, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap PAD Kota Padang.

#### BAB VI : PENUTUP

Berisi ringkasan atas hasil pembahasan penelitian yang sudah diuraikan secara panjang lebar dan mendalam pada bab terdahulu. Secara rinci terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, implikasi dan saran-saran untuk kajian lanjut.

#### DAFTAR PUSTAKA

